



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI HIDAJATI
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 863253

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **710.000.000**

1. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 201 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 814 m2/21 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 809 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **198.000.000**

1. MOTOR, HONDA VIJ02Q32LO AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOBIL, MAZDA MAZDA BIANTE 2.0L 5 A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **189.219.090**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.097.219.090**

III. HUTANG **Rp.** **65.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.032.219.090**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.